



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 133 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TATA
KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan pada program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perlu dilakukan penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas program Tiga Juta Rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim

Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman dalam Mendukung Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM TIGA JUTA RUMAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman dalam Mendukung Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan proyek perubahan strategi penguatan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman dalam mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I ini atas nama Hermawan.
- KETIGA : Tim Efektif sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

ttd

SARAH SADIQA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM
TIGA JUTA RUMAH

NOMOR : 133 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mentor	Iwan Herniwan, S.Si., M.P. / Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memiliki kewenangan sebagai berikut: a. memberikan persetujuan, dukungan, dan arahan Proyek Perubahan; b. memberikan bimbingan dan arahan kepada <i>Project Leader</i> dalam merumuskan, mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis nasional; c. membantu menyelesaikan hambatan; dan d. mengoordinasikan Proyek Perubahan pada level pimpinan.
2.	Coach	DR. Makhdum Priyatno, MA/ Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan bimbingan, motivasi dan arahan-arahan kepada <i>Project Leader</i> dalam aspek substansi

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		Negara	Proyek Perubahan yang akan dilakukan; dan b. memantau kegiatan <i>Project Leader</i> .
3.	<i>Project Leader</i>	Dr. Hermawan, SE, MM	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memimpin pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan; dan b. memberikan arahan dan mengoordinasikan Tim Kerja dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan.
4.	Tim Sumber Daya Manusia	1. Miftah Irfaniah 2. Adreng Kusuma Ayuningtyas 3. Dewi Sadtyaji 4. Hamzah Abdul Majid 5. Setiaji Santoso	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan masukan dan dukungan penyediaan data terkait Sumber Daya Manusia untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan; b. membantu memberikan gambaran penjelasan terkait Sumber Daya Manusia dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; c. membantu penyusunan substansi Proyek Perubahan yang disusun oleh <i>Project Leader</i> ; dan d. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.
5.	Tim Kelembagaan	1. Thanthawi Jauhari 2. Intan Dana Lestari 3. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 4. Amirul Mahmud	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan masukan dan dukungan penyediaan data terkait substansi Kelembagaan untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan; b. membantu memberikan gambaran penjelasan terkait substansi Kelembagaan dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; c. membantu penyusunan substansi Proyek Perubahan yang disusun

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			oleh <i>Project Leader</i> ; dan d. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.
6.	Tim Teknologi Informasi	1. Mahfuzan Zakaria 2. Tito Sulistiyo 3. Pandu Taruna Kristianto G 4. Elvi Egyasti 5. Heriyana 6. Desi Kartika	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. membantu penyusunan teknis sistem teknologi informasi pada Proyek Perubahan yang disusun oleh <i>Project Leader</i> ; b. Menyediakan dukungan teknis termasuk instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pembaruan sistem serta pengamanan data; dan c. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.
7.	Tim Regulasi	1. Himawan Giri Dahlan 2. Dedi Setiawan 3. Rini Handriyani 4. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan masukan dan dukungan penyediaan data terkait regulasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan; b. membantu memberikan gambaran penjelasan terkait regulasi dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; dan c. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.
8.	Tim Advokasi / Pendampingan	1. Mukti Herlambang 2. Andi Putri Fathania Nur Ranti F 3. Sella Berlian R 4. Dian Arsita	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan masukan dan dukungan penyediaan data terkait advokasi/pendampingan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan;

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		Wardhani	b. membantu memberikan gambaran penjelasan terkait pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; dan c. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA